

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan pembayaran dari masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memungut pajak atas pembayaran dari masyarakat. Pungutan pajak suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Pungutan dalam pembayaran pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan ketentuan baru yang berlaku oleh

pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Dalam hal ini aparat perpajakan khususnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang mengatur perpajakan tersebut, khusus pemerintah daerah yang ingin meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh sebab itu perpajakan diletakkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban dalam rangka gotong royong nasional dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Semenjak adanya undang-undang otonomi daerah atau adanya wewenang sebuah daerah baik itu provinsi dan kabupaten untuk mengatur sendiri keuangannya, mulai dari pendapatan dan pengeluaran. Maka pemerintah daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran negara. Salah satu alternatif sumber daya mulai ditingkatkan dan dianggap bisa meningkatkan pendapatan, misalnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan hasil olahan lainnya.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah yang cukup potensial, dimana jumlah kendaraan bermotor yang terlihat di daerah ini cukup banyak, hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel. 1.1. Daftar Penerimaan PKB, BBN-KB I Dan BBN-KB II Tahun 2011 s/d Tahun 2013 Di UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.**

NO	TAHUN	PKB	BBN-KB I	BBN-KB II
		UNIT	UNIT	UNIT
1	2011	14.520	3.382	34
2	2012	15.326	2.952	60
3	2013	15.554	2.440	300

*Sumber : Kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.*

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya meningkat karena seiringnya pertambahan jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terlihat pada tahun 2011 jumlah penerimaan PKB yaitu sebanyak 14.520 unit, pada tahun 2012 sebanyak 15.326 dan pada tahun 2013 sebanyak 15.554. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN-KB I) terjadi penurunan setiap tahunnya karena gejolak ekonomi yang dialami masyarakat

Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru jadi menurun. Dapat kita lihat pada tabel diatas penerimaan BBN-KB I pada tahun 2011 sebanyak 3.382 unit, pada tahun 2012 sebanyak 2.952 unit dan pada tahun 2013 sebanyak 2.440 unit. Namun penerimaan BBN-KB II mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2011 hanya 34 unit, pada tahun 2012 sebanyak 60 unit dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebanyak 300 unit.

Pada zaman modern ini terlihat banyaknya masyarakat yang menggunakan dan membutuhkan kendaraan bermotor untuk membantu meringankan kegiatan dan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari, namun masyarakat itu sendiri banyak yang tidak mengerti bagaimana pelaksanaan pembayaran denda piutang pajak kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang di gunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan lainya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan termasuk alat-alat yang bergerak.

Pengertian pajak kendaraan bermotor secara umum adalah pajak yang di pungut atas kepemilikan, penggunaan dan pengawasan kendaraan bermotor. (Marihot P. Siahaan, 2013 : 175)

Pengertian pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor (Perda Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011).

Dalam upaya mengefektifkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah dengan peningkatan pelayanan. Upaya tersebut diantaranya dengan cara penyederhanaan system dan prosedur. Diskresi pelayanan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas pendapatan daerah, Sedangkan “kebijakan diskresi pelayanan” yaitu memberikan keleluasan bagi para kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan aparat Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk melakukan perubahan system dan prosedur dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan cara memangkas mekanisme pelayanan yang dianggap birokrasi. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dilakukan oleh tiga instansi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta PT. Jasa Raharja (PERSERO) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada

masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat Selat Panjang yang telah berubah menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam hal ini yang diterapkan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti ialah penerimaan secara online (modern). Namun pembaharuan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang lebih sederhana, diharapkan administrasi perpajakannya dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami.

Penulis tertarik pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan dengan adanya perubahan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang lebih sederhana, administrasi perpajakannya dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami.

Dengan latar belakang masalah dia atas sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar perubahan penerimaan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti. Dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bagi Jurusan Administrasi Perpajakan

Memberikan tambahan koleksi penulisan Tugas Akhir diperpustakaan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Menambah pengetahuan dan dapat memberikan informasi kepada pihak pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan, pertimbangan, panduan untuk mengetahui sistem pembayaran pajak

kendaraan bermotor di Kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **1.4.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti. Waktu penelitian pada tanggal 10 maret sampai 2 april 2014.

##### **1.4.2. Jenis Data**

- a. Data primer, diambil atau di peroleh langsung melalui wawancara, penulis akan mewawancari pegawai di kantor tersebut. Dalam melakukan prakter kerja lapangan di kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data sukunder, data yang di peroleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penenlitian

#### **1.5. Metode Pengumpulan Data**

- a. Observasi

Mekanisme pengumpulan data ini di lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam



sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala Bagian atau pihak-pihak yang bisa di jadikan narasumber dan penulis anggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat.

### **1.6. Analisis Data**

Data yang di peroleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat **kualitatif**, yaitu penjalasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan ,masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAEARAH**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gamabaran umum kantor dinas pendapatan daerah, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur

organisasi unit kerja di UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini penulis perlu membahas tentang Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak Pusat Dan Pajak Daerah, Pengertian Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak menurut syariat islam, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, Mekanisme penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tata Cara Perhitungan Pajak kendaraan Bermotor, dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang di kemukakan atas dasar penelitian yang telah di lakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**